

**PENGARUH PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN
KOMISARIS INDEPENDEN, DAN UKURAN KOMITE AUDIT
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu



Oleh :

SETIYO RENI

NIM: 2008310122

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2012

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Setiyo Reni
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 29 Januari 1985
N.I.M : 2008310122
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul : Pengaruh Proporsi Kepemilikan Institusional, Ukuran Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Pada Perusahaan Manufaktur

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

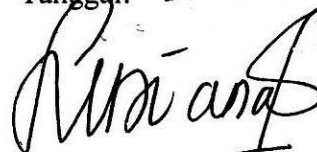
Tanggal: 5 Maret 2012



(Diyah Pujiati, S.E.,M.Si)

Co.Dosen Pembimbing,

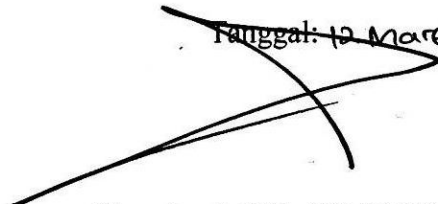
Tanggal: 5 MARET 2012.



(Luciana Spica Almilia, S.E.,AK.,M.Si)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal: 12 Maret 2012



(Supriyati, S.E.,AK.,M.Si)

PENGARUH PROPORSI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN KOMISARIS INDEPENDEN, dan UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

SetiyoReni

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2008310122@students.perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether voluntary disclosure related to the proportion of institutional ownership, the size of an independent commissioner and the size of audit committees. Factors that are used consist of proportion of institutional ownership, the size of an independent commissioner and the size of audit committees. The aims of this study using data covering the period 2008-2009 the manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). Data obtained from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The samples of this study are consist of eighty nine companies. Data analyzed classic assumption test, and the examination of the hypothesis use model of multiple linier regression. The results of this study indicate that the proportion of institutional ownership, the size of an independent commissioner and the size of audit committees is not related to the extensive voluntary disclosure.

Keyword : *voluntary disclosure, institutional ownership, independent commissioner, audit committees.*

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*pastperformance*), serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen.

Menurut teori agensi, terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam suatu perusahaan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipel

dan agen. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya *agency cost*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Fitri dan Mamduh (2003) berpendapat bahwa perilaku *moral hazard* dan asimetri informasi dapat dicegah melalui perjanjian dengan memberikan insentif berupa kompensasi keuangan yang diperhitungkan sebagai *agency cost*, sehingga manajer akan termotivasi untuk menyediakan pengungkapan sukarela untuk mengurangi *agency cost*. Biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan

pengendalian internal merupakan *agency cost*.

Kepemilikan institusional adalah hak atas kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi keuangan lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (publikasi FCGI).

Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang sehat cenderung untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang mengalami *financial distressed* (Nasir dan Abdullah, 2004). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami *financial distressed* akan mengungkapkan informasi lebih sedikit daripada perusahaan yang sehat keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas, dan indikator jenis berita berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan sukarela. Perusahaan yang memiliki *good news* dapat ditandai dengan perolehan laba tinggi maupun profitabilitas tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan yang bersifat *nonmandatory* guna menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Dengan demikian, diprediksi bahwa perusahaan yang finansialnya tertekan memiliki motivasi yang lebih kecil untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dari perusahaan yang sehat secara finansial.

Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan

dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan (Healy dan Palepu, 2001). Pengungkapan sukarela meliputi gambaran strategi perusahaan dalam jangka panjang, indikator-indikator non-keuangan yang penting dan bermanfaat untuk keefektifitasan implementasi strategi perusahaan dan berguna dalam membahas hubungan antara indikator-indikator penting tersebut dengan laba yang akan datang. Dengan adanya pengungkapan sukarela diharapkan para pemakai laporan keuangan akan semakin lengkap informasinya dalam memahami kegiatan operasional perusahaan dan semakin menunjukkan transparansi perusahaan.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Suartana (2010) menyatakan bahwa teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, dimana pemilik perusahaan atau investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola perusahaan atas nama pemilik. Manajemen diberikan wewenang dalam kebijakan pengambilan keputusan sehingga manajemen diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk menyejahterakan pemilik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teori agensi menyatakan bahwa masing-masing pihak (prinsipal dan agen) hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya maka manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang sebaliknya manajemen cenderung memaksimalkan profit jangka pendek dengan mengabaikan

sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Prinsipal memaksa pihak manajemen untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai standar agar dapat memonitor dan mengendalikan tindakan pihak manajemen. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan tingkat kemakmuran sebagai kepentingannya masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan dan pemisahan kepemilikan perusahaan antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat menimbulkan konflik. Penyatuan kepentingan ini sering menimbulkan masalah keagenan yang disebut dengan konflik agensi (Suartana, 2010).

Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu penyajian informasi dalam laporan keuangan yang menyebutkan setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi pertimbangan pembaca yang menerima informasi. Informasi ini memberikan suatu penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Segala sesuatu yang bersifat material akan diungkapkan dalam laporan, termasuk informasi kuantitatif (secara tuntutan) yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun negatif, mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi, serta yang ditetapkan oleh otorisasi atau badan pengawas pasar modal serta bursa saham.

Manajemen sebagai pengelola kekayaan perusahaan berperan sebagai agen, sementara investor sebagai pemilik berperan sebagai *principal*. Laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemilik (Ainun dan Fuad, 2000). Laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan investor luar (Healy

dan Palepu 1993 dalam Ainun dan Fuad 2000). Rasional yang mendasari perlunya praktek pengungkapan L/K oleh manajemen kepada *stakeholder* dijelaskan dalam hubungan principal dan agen (Ainun dan Fuad, 2000).

Luas Pengungkapan Sukarela

Laporan tahunan merupakan media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi perusahaan baik yang berupa kondisi keuangan maupun informasi lainnya kepada pemegang saham, *stakeholder*, kreditor. Kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan. Pengungkapan sukarela tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan, yang dipandang manajemen relevan dalam membantu pengambilan keputusan. Dengan kata lain Imhoff mengatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan (Imhoff 1992 dalam Ainun dan Fuad 2000).

Menurut Sabeni (2002) suatu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan, perusahaan akan memperhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan. Bila manfaat yang akan diperoleh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan maka perusahaan dengan sukarela mengungkapkan informasi perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan sukarela perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Biaya pengungkapan sukarela merupakan seluruh biaya yang berhubungan

langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela.

Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah hak atas kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi keuangan lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan memiliki sumber daya, kemampuan, dan kesempatan untuk mengawasi manajer agar lebih berfokus pada nilai perusahaan dalam jangka panjang. Investor institusional yang memiliki proporsi besar dalam kepemilikan saham perusahaan dapat mendesak agar manajer melakukan pengungkapan sukarela dan memaksakan tujuan investasi mereka dengan memberikan usul dan saran pada pihak manajer.

Apabila kepemilikan saham terkonsentrasi, pemilik paling besar dapat memainkan peranan dalam pengawasan manajemen. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) pemilik saham besar dapat melakukan pengawasan karena dapat memperoleh informasi dan mengawasi manajemen serta mempunyai hak suara untuk menekan manajemen. Pengawasan yang tinggi dari pihak luar terhadap manajemen akan menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi perusahaan dan informasi tersebut digunakan dalam perencanaan dan evaluasi (Rahmawati, 2006).

Kepemilikan institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total lembar jumlah saham yang beredar (Hexana, 2005).

Menurut Hexana (2005), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih mampu untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

Ukuran Komisaris Independen

Penelitian Beasley (1996) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Chtourou et al (2001) dalam Hamonangan dan Mas'ud (2006) menginvestigasi apakah praktek tata kelola perusahaan memiliki pengaruh kepada kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan. Mereka menemukan bahwa earnings management secara signifikan berhubungan dengan beberapa praktik governance oleh dewan komisaris dan komite audit. Untuk komite audit, income increasing earning management secara negative berasosiasi dengan proporsi anggota (member) yang besar dari luar yang bukan merupakan manajer pada perusahaan lain. Untuk dewan komisaris, income increasing earning management yang rendah pada perusahaan yang memiliki outside board members yang berpengalaman sebagai board members pada perusahaan dan pada perusahaan yang lain. Artinya bahwa proporsi jumlah anggota dewan komisaris independen secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba.

Ukuran Komite Audit

Awal mulanya terbentuk Sarbanes Oxley Act (SOX) karena ada kasus Enron yang diindikasikan kurangnya pengendalian internal perusahaan. Pasal 301 dari undang-undang SOX tahun 2002 mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan komite audit yang semua anggotanya merupakan direktur independen. Di Indonesia, terdapat peraturan BAPEPAM-LK no.IX 1.5 yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga orang, yang diketuai oleh satu orang komisaris independen dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (publikasi FCGI).

Ho dan Wong (2001), menggunakan data Hong Kong, menemukan hubungan signifikan positif antara independensi komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela. Dalam laporan tahunan, memperlihatkan bahwa komite audit membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit dapat meningkatkan

pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela.

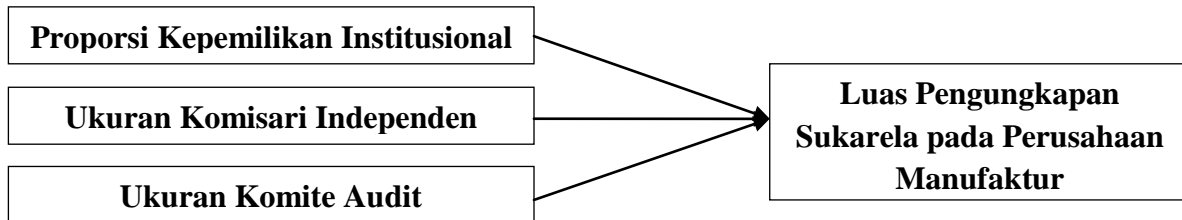
Kajian Teori Agensi

Teori agensi menyatakan dan menjelaskan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principle*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*). Dalam penelitian ini pihak *principle* yaitu perusahaan dan menerima wewenang atau *agency* yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, dan ukuran komite audit (Suartana, 2010).

Teori agensi menjelaskan bahwa suatu kontrak dimana prinsipel memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipel. Dalam penelitian ini bagaimana variabel independen bekerjasama untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Misalnya dalam pengungkapan informasi perusahaan. Bagaimana anggota dewan komisaris mempertahankan independensi terhadap tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan, dan bagaimana pula komite audit mengungkapkan laporan keuangan apakah sudah sesuai atau belum serta untuk mengetahui kepemilikan yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk publik.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 1:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: terdapat pengaruh antara proporsi kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

H2: terdapat pengaruh antara ukuran komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

H3: terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pada rancangan penelitian ini dapat dilihat menurut jenis dan penelitiannya dalam beberapa aspek. Menurut tujuannya termasuk penelitian dasar, sebab penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur (Agy Pramunia, 2010).

Menurut jenis datanya penelitian ini termasuk dalam penelitian arsip karena data yang digunakan merupakan data sekunder dengan studi dokumentasi dari *Indonesian Capital Market Directory* (Agy Pramunia, 2010).

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini yaitu hanya pada karakteristik perusahaan, seperti proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, ukuran komite audit yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur. Periode yang digunakan adalah mulai tahun 2008-2009 dan objek yang digunakan adalah

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Identifikasi Variabel

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Variabel Independen .

- Proporsi Kepemilikan Institusional
- Ukuran Komisaris Independen
- Ukuran Komite Audit

Variabel Dependen

- Luas Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Manufaktur

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah luas pengungkapan sukarela yang diprosikan dengan Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS). Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Indeks pengukuran pengungkapan sukarela dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) mengembangkan daftar item pengungkapan sukarela dan (2) mengukur skor pengungkapan sukarela terhadap sampel laporan tahunan. Daftar item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dikembangkan berdasarkan item pengungkapan dan disesuaikan dengan item pengungkapan wajib menurut peraturan Bapepam. Menghitung variabel dependen dengan menggunakan rumus :

$$IPS = \frac{n}{k}$$

Dimana :

n: jumlah butir yang diungkapkan oleh perusahaan

k: jumlah butir pengungkapan terbanyak yang diungkapkan oleh perusahaan

Variabel Independen

Proporsi kepemilikan institusional

Proporsi kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar (Hexana, 2005).

$$KI = \frac{\text{jml shm yg dimiliki institusi lain}}{\text{jumlah lembar saham}} \times 100\%$$

Ukuran Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Independensi dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen dalam suatu dewan komisaris perusahaan. Independensi dewan komisaris diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah anggota dewan komisaris (Hexana, 2005).

$$KI = \frac{\text{jumlah anggota KI}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Ukuran Komite Audit

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, rencana dan komitmen jangka panjang, memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, dan memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ukuran komite audit

dihitung dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan (Hexana, 2005).

Populasi, sampel dan teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori maka populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2009.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode judgement sampling, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling*, yaitu penelitian sampel dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu sehingga relevan dengan rancangan penelitian.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2009.
2. Data laporan keuangan dan *annual report* untuk periode dari tahun 2008-2009

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan mulai tahun 2008 - 2009 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter, yaitu dengan cara mencatat data dari laporan, catatan, dan arsip seperti laporan tahunan perusahaan.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Adapun langkah – langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perhitungan terhadap variabel yang akan dianalisis yaitu proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, ukuran

komite audit, dan pengungkapan sukarela.

2. Menentukan tingkat pengungkapan perusahaan dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah pengungkapan sukarela berdasarkan pengungkapan wajib yang diungkapkan oleh perusahaan dengan jumlah pengungkapan terbanyak.
3. Pengujian asumsi klasik
Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji multikolonieritas, dan uji Heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi atau R-square menunjukkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat fit atau tidaknya model penelitian. Model dikatakan fit, jika probabilitas signifikansi uji F $\geq 0,05$.

Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Cara

melakukan uji t adalah apabila probabilitas signifikansinya $\leq 0,05$, H_0 yang menyatakan $\beta_1 = 0$ ditolak.

Uji Asumsi Klasik

Adapun beberapa uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak dengan uji one-sample Kolmogorov – Smirnov (K-S) dengan tingkat signifikansi 0,05.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan yang sempurna antara beberapa/semua *independent variable* dalam model regresi. Pendeteksianya dilakukan dengan menggunakan *tolerance value* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Jika nilai *tolerance value* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2007). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deskriptif Variabel

Berikut beberapa gambaran mengenai masing – masing variabel dependen dan variabel independen penelitian.

Pengungkapan Sukarela

Untuk variabel pengungkapan sukarela, bisa diketahui nilai terendah sebesar 0.0645 dan nilai tertinggi sebesar 0.7241. Jadi dari tabel perhitungan dapat dijelaskan bahwa pengungkapan terbanyak diungkapkan oleh PT Indocement Tungal Perkasa Tbk, Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengungkapkan lebih banyak dari pada perusahaan lainnya dalam satu industri manufaktur. Karena perusahaan memiliki tata kelola perusahaan dan tanggungjawab sosial perusahaan yang baik. Pengungkapan terendah diungkapkan oleh PT United Tractor Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih sedikit mengungkapkan dari pada perusahaan lainnya. Rata – rata prosentase indeks pengungkapan yang dilakukan oleh sampel penelitian sebesar 0.405833 dengan standar deviasi 0.1411859.

Proporsi kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Kepemilikan institusional diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki investor institusional dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Dari hasil uji maka diketahui bahwa pada kepemilikan institusional untuk jumlah sampel sebanyak 89 perusahaan manufaktur mempunyai kepemilikan terendah sebesar 0,00 persen dan kepemilikan tertinggi sebesar 99.14%. Rata – rata nilai dari kepemilikan institusi adalah 0.648747 dengan standar deviasi 0.2586097.

Kepemilikan institusi perusahaan bisa dipengaruhi oleh kinerja yang dihasilkan perusahaan. oleh karena itu pihak luar akan melihat bagaimana kinerja dari perusahaan itu apakah investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut atau tidak. Kinerja perusahaan dapat

dilihat dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ataupun bisa juga dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. investor akan melihat informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak lain pengawasan dari pihak eksternal juga semakin baik. Oleh karena itu, kepemilikan saham yang besar oleh institusi lain akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dari pihak eksternal.

Ukuran komisaris independen

Komisaris independen dalam penelitian ini merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini merujuk pada Peraturan Pencatatan Efek No I – A PT Bursa Efek Jakarta mengenai mengenai jumlah anggota komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris dalam suatu perusahaan. dari hasil uji diketahui bahwa nilai tertinggi sebesar 1.00% dan nilai terendah sebesar 0.00%. Nilai rata – rata sebesar 0.392196 dan standar deviasi sebesar 0.1175593. Nilai tertinggi yaitu pada PT Bentoel International Investama Tbk pada tahun 2009. Nilai terendah yaitu pada PT Merck Tbk pada tahun 2008. Dengan total jumlah sampel sebanyak 89 perusahaan selama tahun 2008-2009.

Dilihat dari nilai rata – rata yang sudah lebih dari 30% maka perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel sudah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang mengharuskan perusahaan memiliki minimal 30% komisaris independen dalam perusahaan. Perusahaan membutuhkan komisaris dalam proses pengelolaan manajemen karena komisaris

independen memiliki tanggungjawab untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam suatu perusahaan. Melalui dewan komisaris diharapkan dapat melakukan tugasnya yaitu mengawasi serta memberi nasehat kepada dewan direksi perusahaan secara efektif supaya lebih bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Komite audit

Untuk variabel komite audit dapat diukur berdasarkan jumlah yang dimiliki oleh perusahaan dengan jumlah satuan orang. Dari hasil uji diketahui bahwa jumlah komite audit terendah adalah sebanyak 2 orang dan tertinggi sebanyak 4 orang. Dengan jumlah rata – rata 3 orang dalam setiap perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 89 perusahaan. Terdapat 2 perusahaan yang jumlah komite audit yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk dan PT Pan Brother Tex Tbk. Terdapat 6 perusahaan yang memiliki anggota komite audit dengan jumlah 4 orang.

Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka dapat mengurangi tindakan kecurangan – kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen. Terutama adalah kecurangan yang bersifat material, sebab keberadaan komite audit ini sangat penting dan cukup berpengaruh terhadap kinerja manajemen suatu perusahaan. Komite audit juga dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak menyesatkan pengguna informasi, sehingga akan dapat meyakinkan para investor untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang distribusi data normal mendekati normal, yaitu data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Untuk menguji normalitas residual dengan *uji statistic non parametric kolmogorov-smirnov(K-S)*. hasil uji diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar $0.898 > 0.05$ hal ini berarti data residualnya berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2005:91). Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF dan tolerance. Hal ini juga ditegaskan kembali dari hasil korelasi yang cukup serius. Korelasi tertinggi 0.108 yaitu antara komisaris independen dan komite audit. hasil uji diketahui bahwa semua variabel dengan nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0.10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005:105). Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas akan diuji menggunakan uji gletser dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Hasil uji diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas signifikan diatas 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diolah, diketahui hasil uji koefisien determinasi menunjukkan adjusted R square sebesar -0.019. Hal ini berarti -0.16% variasi luas pengungkapan sukarela tidak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Berdasarkan hasil uji F maka nilai F hitung sebesar 0.534 dengan probabilitas signifikan $0.660 > 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap luas pengungkapan sukarela.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen dan ukuran komite audit tidak memiliki probabilitas signifikan sehingga variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil dari penelitian ini akan dibahas berdasarkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh proporsi kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional. Kepemilikan institusional diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki investor institusional dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Informasi kepemilikan institusional diperoleh dari laporan tahunan atau *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Hasil pengujian hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tersebut diterima (H_0 diterima). Hal ini terjadi karena perusahaan yang ada di Indonesia masih banyak yang belum memahami tentang *corporate governance* sehingga banyak investor yang merasa ragu untuk menanamkan modalnya di perusahaan tertentu.

2. Pengaruh ukuran komisaris independen

Dari hasil penelitian variabel ukuran komisaris independen memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar dari nilai yang ditetapkan, dengan nilai koefisien negative. Hal ini menunjukkan variabel ukuran komisaris independen secara parsial tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel luas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris pada perusahaan sampel masih rendah, sehingga kemampuan komisaris independen dalam memantau perilaku dewan direksi belum maksimal. Hal ini terlihat dari rata-rata jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris pada perusahaan sebanyak 0.391733 dari total dewan komisaris. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris dalam suatu perusahaan belum berpengaruh dalam pemantauan luas pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003) yang menyatakan bahwa komisaris independen, komite audit tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan adanya hubungan dengan luas pengungkapan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sabeni (2002) yang menyatakan bahwa komisaris independen mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan.

3. Pengaruh ukuran komite audit

Dari hasil penelitian variabel ukuran komite audit memiliki tingkat signifikan yang lebih besar dari tingkat yang telah ditetapkan yaitu 0.05 dengan nilai koefisien

negative. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Ditolaknya hipotesis ini adalah jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan. Hasil penelitian ini juga mencerminkan bahwa rata-rata komite audit adalah 3 atau dapat dikatakan ukuran komite audit perusahaan masih rendah, sehingga belum mampu mempengaruhi luas pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian tidak mendukung penelitian Ho and Wong (2002) yang berhasil memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan sukarela. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sabeni (2002) bahwa komite audit mempunyai pengaruh dengan komite audit.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama dua tahun yaitu tahun 2008-2009. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id), dan informasi dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*. Sampel penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji

heterokedastisitas. Uji normalitas diuji dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan data terdistribusi normal dengan jumlah sampel perusahaan sebanyak 89 perusahaan. Uji multikolinieritas bisa di ketahui dengan menggunakan nilai VIF dan Tolerance dan juga bisa dengan menggunakan Coefficient Correlation yang menghasilkan data tidak terjadi adanya multikolinieritas. Uji heterokedastisitas diuji menggunakan uji gletser dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen yang menghasilkan model regresi tidak terdapat heterokedastisitas.

Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa variabel independen (proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit) tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa variabel independen (proporsi kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, dan ukuran komite audit) juga tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Jadi dari penelitian ini tidak berhasil membuktikan teori bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Yang menjadi penentuan item pengungkapan sukarela adalah subyektifitas dari peneliti. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini mengalami kendala pada pencarian sampel, karena perusahaan banyak yang tidak menerbitkan laporan tahunan atau *annual report*.
2. Variabel independen proporsi kepemilikan institusioanal, ukuran

komisaris independen, dan ukuran komite audit belum sepenuhnya mewakili pengukuran luas pengungkapan sukarela.

3. Penelitian masih bersifat kuantitatif yang dimana datanya diperoleh dari sumber yang telah ada.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu : sebaiknya menggunakan metode pengamatan lebih dari dua tahun, dengan periode waktu yang lebih baru lagi, sebaiknya ditambahkan variabel lain, contohnya *leverage*, net profit margin, atau ROA, dan mencoba menggunakan metode kualitatif yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan team manajemen perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lain dan tentunya lebih baik lagi sehingga dapat melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

Agy Pramunia Saputri, 2010. Pengaruh *Corporate Governance dan Financial Distressed* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 2010.

Ainun dan Fuad. 2000. Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 15 No. 1 hal 70-82.

Fitri Ismiyanti dan Mamduh M. Hanafi, 2003. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Utang, dan Kebijakan Dividen : Analisis Persamaan Simultan. Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya.

Gozhali, Imam. 2007. SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Undip: Semarang.

Hexana Sri Lastanti, 2005. Hubungan Struktur *Corporate Governance* dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar. Konferensi Nasional Akuntansi.

IAI. 2007. Standart Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

I Wayan Suartana, 2010. Akuntansi Keperilakuan “Teori dan Implementasi”. Yogyakarta : Andi.

Imanda Firmantyas Putri dan Mohammad Nasir, 2006. Analisis persamaan Simultan Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Risiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen dalam Perspektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Jensen M. C and Meckling (1976). *Theory of the firm managerial behavior, agency cost, and ownership structure*. *Journal of financial economics* 3 (3), 305-360.

Paul M. Healy, Krishna G. Palepu. 2001. *Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature*. *Journal of Accounting and Economics* 31 (2001) 405-440.

Sabeni Arifin, 2002. *An empirical analisis of the relation between the board of director's composition and the level of voluntary disclosure*. Simposium Nasional Akuntansi V Semarang.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Setiyo Reni
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 29 Januari 1985
Status Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mulyosari Timur No. 134, Surabaya
Telepon / HP : 031 – 5921447 / 0815 5396 8855
Institusi : STIE Perbanas Surabaya
Alamat Institusi : Jl. Nginden Semolo, Gg. Nginden Baru II, No. 36,
Surabaya
No. Telepon / Fax : 031-5947151, Fax: 031-5935937
Alamat E – mail : renicantikaputri@yahoo.co.id
2008310122@students.perbanas.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

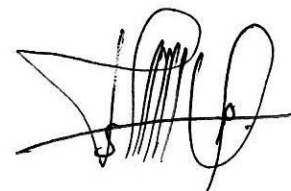
2008—Sekarang : S1 Jurusan Akuntansi, STIE Perbanas Surabaya
2000—2003 : SMK PGRI 1 Ponorogo
1997—2000 : SLTP Negeri 1 Badegan
1991—1997 : SDN 1 Tanjung Rejo

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Capung HMJ Akuntansi STIE Perbanas Surabaya (2008 – 2009)
- Staff HCC HMJ Akuntansi STIE Perbanas Surabaya (2009 – 2010)
- Staff HCC HMJ Akuntansi STIE Perbanas Surabaya (2010 – 2011)

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Surabaya, 28 Februari 2012



Setiyo Reni